

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Evaluasi Proses Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Kategori Terkendala, didasarkan pada teori William Dunn (1994:405), yang meliputi 6 indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan, yang secara singkat disimpulkan sebagai berikut:

a. Efektifitas

proses pemulangan PMI kategori terkendala menunjukkan bahwa meskipun telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), tantangan besar tetap dihadapi terutama karena mayoritas PMI berasal dari jalur non-prosedural. Ketidaklengkapan dokumen dan status legal yang tidak jelas membatasi akses terhadap perlindungan serta mempersempit ruang advokasi lembaga. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas intervensi, di mana perlindungan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua kebutuhan spesifik PMI secara maksimal. Evaluasi yang dilakukan pun cenderung membedakan penanganan berdasarkan berat ringannya kasus, sehingga berisiko menimbulkan ketimpangan dalam jaminan perlindungan yang seharusnya merata.

Lebih jauh, efektivitas pemulangan juga perlu mempertimbangkan aspek pasca-kepulangan, seperti keberhasilan reintegrasi sosial dan ekonomi PMI ke masyarakat. Minimnya program pendampingan dan pemberdayaan terhadap PMI non-prosedural meningkatkan potensi mereka untuk kembali bekerja secara ilegal di luar negeri. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas harus bersifat menyeluruh, dimulai dari fase pencegahan sebelum keberangkatan, proses pemulangan yang aman dan sesuai SOP, hingga dukungan reintegrasi yang

berkelanjutan. Upaya ini menuntut penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas petugas, serta pendekatan yang lebih inklusif agar perlindungan terhadap PMI dapat dijalankan secara adil dan manusiawi.

b. Efisiensi

efisiensi dalam proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kategori terkendala menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya harus dilakukan secara optimal untuk menghasilkan dampak yang maksimal. Efisiensi tidak hanya diukur dari biaya yang dikeluarkan, tetapi juga dari ketepatan waktu, ketepatan tenaga, serta kecermatan dalam pelaksanaan prosedur. Namun, berbagai faktor eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, akses transportasi terbatas, dan variasi tarif musiman menjadi tantangan besar dalam mewujudkan efisiensi yang merata di semua daerah. Evaluasi yang dilakukan harus mempertimbangkan konteks lokal, agar kebijakan dan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, efisiensi sangat dipengaruhi oleh status hukum PMI dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pelaksana seperti BP3MI. PMI yang berangkat secara non-prosedural tidak hanya menghadapi risiko perlindungan yang rendah, tetapi juga menambah beban pembiayaan dan kerumitan administrasi. Kurangnya koordinasi dan pelatihan SDM juga sering menyebabkan pemborosan anggaran dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi antarlembaga, transparansi anggaran, serta penggunaan teknologi informasi yang mendukung efisiensi operasional. Evaluasi efisiensi yang berkelanjutan akan menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem pemulangan PMI agar lebih hemat biaya, cepat, dan akuntabel.

c. Kecukupan

kecukupan dalam proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kategori terkendala menunjukkan bahwa berbagai aspek penting telah disediakan dan difungsikan secara maksimal untuk menjamin pemulangan yang aman, manusiawi, dan sesuai hak PMI. Fasilitas seperti mobil jenazah, kursi roda, dan ambulans tersebar di lokasi strategis dan dirawat secara berkala. Dukungan ini mampu menekan biaya tambahan yang seharusnya ditanggung oleh keluarga PMI. Selain itu, pelayanan pendukung seperti pendampingan administratif dan pengadaan alat bantu khusus seperti oksigen juga menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan individu PMI yang berbeda-beda.

Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan tantangan teknis seperti belum adanya kerja sama formal dengan otoritas transportasi, koordinasi lapangan tetap berjalan efektif. Penyesuaian layanan berdasarkan kondisi aktual di lapangan membuktikan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan responsif. Monitoring intensif serta penyediaan konsumsi dan perlengkapan pribadi selama proses pemulangan semakin memperkuat dimensi kecukupan ini. Dengan demikian, BP3MI telah menunjukkan komitmen serius dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang cukup untuk mendukung proses pemulangan PMI secara menyeluruh dan berkeadilan.

d. Pemerataan

Dalam proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kategori terkendala menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan akses yang setara terhadap layanan dan fasilitas telah dijalankan dengan mempertimbangkan tantangan geografis, sosial, dan kondisi individual PMI. Penggunaan berbagai moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, pendampingan khusus bagi kelompok rentan, serta kerja sama dengan pihak keluarga dan

lembaga sosial, menjadi bukti adanya pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen BP3MI untuk menjamin bahwa setiap PMI, termasuk yang berasal dari daerah terpencil dan tidak memiliki dokumen lengkap, tetap mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi dalam proses pemulangan.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan survei kepuasan dan beban kerja petugas menjadi hambatan dalam memastikan evaluasi layanan yang konsisten dan menyeluruh. Walau begitu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi SIPUNTEN menjadi inovasi positif dalam mempercepat pendataan dan memperkuat pengawasan. Pemerataan dalam pemulangan PMI tidak hanya berarti memberikan layanan fisik secara merata, tetapi juga menjamin keadilan dalam setiap proses—mulai dari pendataan, perlindungan, hingga reintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, evaluasi yang lebih sistematis, dan penguatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar prinsip keadilan sosial dalam pelayanan pemulangan PMI benar-benar terwujud.

e. Responsivitas

Dalam proses pemulangan PMI kategori terkendala menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan layanan menjadi aspek kunci dalam perlindungan pekerja migran. Respons yang cepat terhadap kasus darurat seperti sakit, penahanan, atau kematian telah menunjukkan adanya perhatian dari lembaga terkait, meskipun proses pemulangan bagi PMI yang sehat masih terkendala oleh birokrasi dan keterbatasan sistem. Keterlambatan dalam pemantauan jadwal transportasi serta belum terintegrasinya sistem informasi juga menjadi hambatan serius. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi petugas serta komunikasi yang belum optimal kepada PMI dan keluarganya turut memengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Untuk memperkuat responsivitas, dibutuhkan pembaruan sistem secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi, prosedur, maupun kapasitas SDM. Sistem informasi yang real-time, saluran komunikasi darurat yang mudah diakses, dan pelatihan bagi petugas dapat mempercepat proses pemulangan serta mengurangi ketidakpastian di lapangan. Sinergi antar pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, responsivitas dalam pemulangan PMI akan menjadi wujud nyata perlindungan negara yang tanggap, manusiawi, dan berkeadilan.

f. Ketepatan

proses pemulangan PMI kategori terkendala memainkan peran penting dalam menjamin bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan individual dan kondisi spesifik para pekerja migran. Evaluasi yang tepat mencakup identifikasi kebutuhan kesehatan, psikologis, sosial, dan administratif, sehingga intervensi yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan responsif dan manusiawi. Sinergi antarlembaga di dalam dan luar negeri juga menjadi penentu ketepatan pelaksanaan, sebab koordinasi yang efisien akan mempercepat proses pemulangan, menghindari kesalahan prosedur, dan mengurangi beban tambahan bagi PMI.

Namun, ketepatan juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, baik internal antar petugas maupun antara lembaga dengan PMI. Ketika komunikasi berjalan lancar dan SOP diterapkan dengan adaptif terhadap dinamika lapangan, maka kontinuitas layanan dapat terjaga. Evaluasi yang akurat akan mendorong koordinasi yang lebih solid dan respons cepat terhadap situasi kompleks, serta memperkuat pendekatan perlindungan yang berlandaskan hak asasi manusia. Untuk mendukung hal ini, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan rutin

sangat dibutuhkan, di samping pendekatan persuasif yang membuat PMI lebih aktif dan kooperatif dalam menyampaikan kebutuhannya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. BP3MI perlu menangani setiap PMI sesuai kebutuhan pribadi mereka, terutama yang non-prosedural. Evaluasi harus dilakukan dari sebelum berangkat, saat pemulangan, hingga setelah pulang. Program pelatihan dan pendampingan perlu diperkuat agar mereka tidak kembali bekerja secara ilegal.
2. BP3MI perlu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan dan aplikasi pelaporan. Kerja sama dengan instansi daerah penting agar tidak terjadi keterlambatan atau pemborosan.
3. Fasilitas seperti ambulans dan kursi roda harus ditambah dan dirawat. Kerja sama dengan rumah sakit dan transportasi publik perlu diperluas. Layanan khusus juga harus disediakan untuk PMI dengan kebutuhan tertentu.
4. BP3MI harus memetakan kondisi PMI berdasarkan asal daerah dan status hukum untuk pemerataan bantuan. Aplikasi SIPUNTEN perlu dimaksimalkan, dan masyarakat diajak ikut serta dalam evaluasi.
5. BP3MI disarankan membentuk tim darurat 24 jam dan mempercepat komunikasi dengan mitra luar negeri. Petugas perlu pelatihan khusus agar bisa cepat tanggap terhadap kasus darurat. Informasi juga harus terbuka dan mudah diakses keluarga PMI.
6. Setiap PMI harus dinilai kebutuhannya sejak awal. SOP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Petugas juga perlu pelatihan agar bisa memberikan layanan yang tepat dan manusiawi sesuai situasi